



SDG's DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI PASCA PANDEMI

Nur Alim Mubin AM

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: nuralimmubinam@gmail.com

Penelitian info

Penelitian history:

Diterima : 22 Juni 2021

Diterima dalam bentuk
revisi : 14 Agustus 2021

Diajukan : 20 Agustus
2021

Kata kunci:

SDG's; pertumbuhan
ekonomi; platform
ekonomi digital.

Abstrak:

Program SDGs di Indonesia sangat penting untuk diwujudkan mengingat konflik ekonomi sangat tinggi dan terus berubah dari waktu ke waktu. Dengan kondisi perekonomian Indonesia yang selalu mengalami kendala akibat dampak kepentingan politik dan intervensi asing yang kuat, diperlukan sejumlah inovasi dan kebijakan agar pencapaian SDGs di bidang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dapat terwujud. Salah satu strateginya adalah menciptakan platform ekonomi digital yang menggunakan prinsip kolaborasi dari semua pihak dan memperkuat manajemen kebijakan, infrastruktur, dan sektor konsumen. Dasar pemikiran ini tidak terlepas dari kuatnya intervensi asing yang merupakan konsekuensi dari utang negara yang selalu meningkat setiap tahunnya. Melalui instruksi Presiden Jokowi, pemerintah pada tahun 2021 telah fokus pada program pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan internasional, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Abstract:

The SDGs program in Indonesia is very important to be realized considering that economic conflict is very high and continues to change from time to time. With Indonesia's economic conditions always experiencing problems due to the impact of political interests and strong foreign interventions, a number of innovations and policies are needed so that the achievement of the SDGs in the areas of economic growth and employment can be realized. One of the strategies is to create a digital economy platform that uses the principle of collaboration from all parties and strengthening the policy management, infrastructure and consumer sectors. The basis of this thinking is inseparable from the strength of foreign intervention which is a consequence of the country's debt which always increases every year. Through President Jokowi's instruction, the government in 2021 has focused on sustainable development programs as stated in international agreements, one of which is economic growth and employment.

Keywords:

SDG's; economic growth;
digital economy platform.

Corresponden author: Nur Alim Mubin AM

Email: nuralimmubinam@gmail.com

penelitian dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2021



Pendahuluan

Pada tahun 2021, pemeritahan Jokowi-Ma'ruf melalui kementerian desa mengungkapkan bahwa pembangunan akan berlanjut pada penguatan sumber daya manusia. Hal ini tidak lepas dari kesepakatan internasional yang mendorong adanya pembangunan yang menysasar pada kepentingan masyarakat secara global. Apalagi isu kemiskinan dan ekonomi adalah topic yang selalu menjadi pembahasan bagi Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga pembangunan ekonomi selalu menjadi perhatian utama setiap rezsim pemerintahan di Indonesia.

Pada tahun 2000, sebanyak 189 negara mendeklarasikan program bersama bernama *The Millenium Development Goals* (MDGs) yang salah satunya focus pada pembenahan ekonomi di Negara-negara tertinggal. Berkat deklarasi ini, angka kemiskinan dunia berhasil diturunkan hingga 50 persen dalam jangka waktu 15 tahun sehingga program ini dilanjutkan dengan tujuan yang sama dengan sedikit prubahan menjadi *sustainable development goals* (SDGs). Merujuk pada data yang dikemukakan oleh World Bank pada tahun 2015 bahwa jumlah penduduk dunia yang sudah mendapatkan pendapatan 1 USD perhari sudah menurun pada angka 10,30 % sejak realisasi MDGs, bahkan untuk penduduk yang hidup pada taraf kemiskinan akut sudah mencapai angka 7.5% ([Sihombing](#), 2013).

Program SDGs di Indonesia menjadi sangat penting untuk direalisasikan mengingat konflik ekonomi sangat tinggi dan berpotensi terus berubah dari masa ke masa. Konflik ekonomi yang dimaksud adalah perebutan sumber daya yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi. Perebutan sumber daya alam, inflasi dan minimnya lapangan kerja yang selama ini terjadi di Indonesia sangat berdampak pada laju prekonomian Indonesia yang pertumbuhannya masih dibawa 6%. Apalagi Indonesia adalah negara yang masih masuk pada kategori berkembang sehingga sangat membutuhkan kerja keras dalam pembangunan ekonomi melalui berbagai macam program.

Perubahan ekonomi yang dialami oleh Indonesia bisa dikatakan berjalan dengan cepat. Pergantian kepemimpinan merupakan factor utama mengapa perubahan paradigma ekonomi mengalami perubahan dari semua dimensi. Meskipun mengalami perubahan, dominasi kapitalisme sebagai pandangan ekonomi yang kini berkembang pesat tidak serta merta berpengaruh kuat dengan praktik ekonomi di Indonesia, bahkan ada satu masa di mana Indonesia beralih menjadi Negara yang menganut paham ekonomi sosialis. Meskipun pada praktiknya cara-cara ini tidak dijalankan karena pengaruh ekonomi global yang cukup kuat ([Prasmuko & Anugrah](#), 2010).

Di era Soekarno-Hatta memimpin negeri ini, pandangan ekonomi yang bersumber pada ide sosialis dan liberal mengalami dinamisasi yang cukup intens. Soekarno yang memiliki kecenderungan untuk menggunakan sosialis sebagai padangan ekonominya juga memiliki penentang keras dari sahabatnya sendiri yang sekaligus wakil presiden yang

mengedepankan prinsip-prinsip kemasyarakatan yang sedikit liberal.

Hanya saja, dengan perubahan-perubahan yang terus terjadi, dinamika politik di Indonesia tidak lagi dapat dikendalikan sepenuhnya oleh Negara. Peran-peran swasta dan Negara-negara maju ikut mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia dari masa ke masa ([Suprijanto, 2011](#)). Apalagi dengan beberapa kali krisis yang terjadi di Negara maju, membuat permintaan ekspor yang berkurang dan investasi yang berjalan lambat sangat berdampak pada melemahnya prekonomian di Indonesia.

Apalagi di rezim Jokowi-Ma'ruf yang satu tahun lebih dilanda pandemi yang tidak tahu kapan akan usai. Berbagai upaya dilakukan agar bisa kembali beraktifitas seperti biasanya. Virus korona hingga saat ini masih menjadi pembahasan di dunia, bahkan menjadi isu global nomor satu. Virus yang telah menjangkit 147 juta jiwa orang dengan jumlah orang yang meninggal sebanyak 3,1 juta lebih membuat dunia terus berupaya menemukan solusi atas permasalahan kemanusiaan yang melanda dunia bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Dampak pandemi *COVID-19* banyak menyasar lini kehidupan masyarakat dunia seperti ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan kebudayaan. Aspek kehidupan paling terasa dampaknya adalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Dalam penelitian ini, saya mencoba untuk membahas tentang hal-hal yang berada dalam ruang lingkup ekonomi seperti pendapatan negara, anggaran belanja nasional dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak *COVID-19* serja bagaimana SDGs pembangunan ekonomi menjadi solusi alternatif. Penurunan ekonomi semakin terasa ditengah kebutuhan penanganan pandemi yang meningkat. Penurunan pendapatan dan tersendatnya laju prekonomian membuat banyak Negara mengalami resesi ekonomi.

Menurut World Bank, ekonomi dunia akan mengalami penurunan hingga angka 5,2 %. Di Indonesia, gejala ini juga dirasakan oleh pemerintah, di mana ekonomi diprediksi akan mengalami minus pendapatan sebesar 2,2% karena dampak *COVID 2019* ([Fahrika & Roy, 2020](#)). Negara-negara besar di beberapa benua seperti Amerika, Eropa dan Asia tidak bisa berbuat banyak dalam meningkatkan laju ekonomi mereka. Apalagi dengan kondisi pandemi yang belum bisa dikendalikan membuat WHO sebagai pemegang otoritas kesehatan di dunia menghimbau untuk semua Negara mengurangi aktivitasnya dalam semua sector.

Dalam beberapa decade ini, tidak bisa dipungkiri bahwa prekonomian Indonesia masih dibawa dominasi global. Masuknya pengaruh ideology kapitalis yang diprakarsai oleh Adam Smith dan ideology sosialis yang diprakarsai oleh Karl Marx memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perjalanan Indonesia baik secara politik maupun ekonomi ([Hafizah, 2005](#)). Sehingga benturan pemikiran dalam ranah ekonomi politik seringkali terjadi di setiap rezim kepemimpinan. Pancasila sebagai asas Negara belum bisa memberikan jalan keluar dalam praktik ekonomi politik karena masih memiliki berbagai tafsir yang terus diperdebatkan hingga saat ini.

Hingga saat ini, dapat disimpulkan bahwa setiap rezim kepemimpinan di Indonesia memiliki refrensi dalam menjalankan roda kebijakan dalam aspek ekonomi dan politik. Sebagai contoh, di rezim orde baru, kiblat pembangunan ekonomi dan pandangan politik mengacu pada pandangan kebijakan barat. Hal ini dapat dibuktikan dengan narasi modernisasi yang dibawa oleh Presiden Soeharto dalam memimpin Indonesia selama 32 tahun lamanya. Pandangan ini menunjukkan bahwa patron kebijakan rezim orde baru selalu

berkiblat pada kebijakan ekonomi politik barat, atau dalam hal ini Amerika dan Eropa.

Maka dari itu, diperlukan sebuah gerakan kreatif yang membuat manusia dan Negara tetap bisa berjalan dalam kondisi yang bisa dikatakan tidak aman, tapi lini-lini kehidupan tetap berjalan normal. Meskipun menerapkan protocol kesehatan sudah dikampanyekan, namun belum cukup untuk menjadi landasan dalam menjalankan aktivitas. Begitu juga dengan vaksin, meskipun sudah diedarkan, namun masih perlu menjalankan protokol kesehatan karena vaksin belum bisa menjadi jaminan orang tidak terpapar *COVID-19*. Sehingga satu-satunya langkah adalah menciptakan hal-hal baru yang membuat masyarakat tetap nyaman beraktifitas tanpa harus mengurangi efektifitas dari kegiatan tersebut.

Krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi *COVID-19* membuat alur distribusi dan pendapatan negara menurun drastis (Islam & [Muyeed](#), 2020). Semua Negara tidak terlalu focus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan infrastruktur sebelum pandemi usai. di Negara-negara maju, beberapa sudah melaporkan mengalami resesi ekonomi karena pembiayaan untuk penanganan pandemi menguras tenaga dan biaya yang cukup banyak sehingga prekonomian menjadi lemah. Secara tidak langsung, kebijakan ekonomi dan ekspansi politik juga berubah secara signifikan.

Dengan kondisi prekonomian yang tidak kondusif di hampir semua Negara, membuat perusahaan yang juga ikut terdampak memberikan pengurangan upah kepada pegawainya, ada juga yang melakukan PHK dengan jumlah besar-besaran karena prekonomian yang anjlok. Pendapatan Negara juga ikut berkurang karena banyak pembiayaan penanganan di bidang kesehatan yang membengkak. Disisi lain, pajak tidak dapat dibayarkan dengan jumlah yang sudah ditetapkan karena pendapatan perusahaan yang berkurang.

Alhasil, di beberapa Negara berkembang seperti Indonesia, jalan satu-satunya diambil adalah menambah utang Negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, lembaga pemerintah dan Negara itu sendiri. Terhitung sejak pandemi, Indonesia sudah berutang 5.877 Triliun pada tahun 2020. Menurut sejumlah pakar ekonomi ternama seperti Rizal Ramli, angka utang Indonesia bisa menjadi boomerang yang akan melemahkan prekonomian Negara dan bisa saja mengalami resesi seperti yang dialami oleh Yunani.

Oleh sebab itu, diperlukan pembangunan ekonomi yang memiliki kekuatan yang kuat agar program ekonomi di Indonesia berjalan secara berkelanjutan. SDGs dalam bidang pembangunan ekonomi dan lapangan pekerjaan adalah salah potensi besar yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia agar pembangunan ekonomi kita tidak bergantung pada kebijakan setiap rezim yang ada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan bahwa melalui SDGs, Indonesia telah berhasil mengurangi angka kemiskinan menjadi 9,8 %, selain itu, pemenuhan air bersih meningkat menjadi 76,44% dan akses layanan kesehatan menjadi 77,78%.

Program pemenuhan kebutuhan dan keterbukaan lapangan kerja yang dapat memancing pertumbuhan ekonomi dan jaminan hidup masyarakat perlu diperkuat dengan berbagai cara, salah satunya dengan merealisasikan SDGs dalam bidang pembangunan ekonomi. Apalagi di masa-masa pandemi *COVID-19* yang membuat ekonomi tidak menentu, dibutuhkan sebuah kebijakan ekonomi yang menguatkan pendapatan Negara dan masyarakat agar kehidupan masyarakat tetap stabil secara ekonomi.

Mengacu pada program yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa dalam masa-masa *COVID-19* program SDGs harus tetap berlanjut karena menjadi kewajiban Negara. Sehingga sangat wajar bila bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah ke masyarakat banyak menysasar UMKM dan sector-sector ekonomi lainnya agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Program ini juga akan sangat berdampak pada ketersediaan lapangan kerja yang memadai pasca PHK besar-besaran yang dilakukan oleh banyak perusahaan karena beban upah yang besar ditengah kondisi keuangan yang tidak menentu.

Metode Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui urgensi program SDGs pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi internasional berdampak pada kondisi ekonomi di Indonesia melalui hasil penelitian yang telah dilakukan di beberapa Negara, khususnya di Asia. Penelitian ini diawali dengan mengkaji bagaimana proses SDGs yang telah dideklarasikan oleh PBB direalisasikan di Indonesia dan seberapa besar dampak SDGs bagi Indonesia dalam aspek ekonomi melalui portal berita nasional dan internasional. Kemudian peneliti mengumpulkan berbagai macam jurnal nasional dan internasional untuk tujuan analisis dan penguatan argumentasi tentang realisasi SDGs di Indonesia di masa-masa pandemic *COVID-19*. literature yang digunakan difokuskan pada jurnal yang membahas MDGs dan SDGs. Lalu peneliti juga melakukan analisis menggunakan Nvivo 12 Pro untuk mengetahui seperti apa potensi pembangunan ekonomi yang tepat bagi Indonesia kedepan.

Studi literatur adalah salah satu jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji secara kritis sebuah gagasan, teori, atau temuan yang ada dalam sebuah literatur dengan tujuan akademik dalam kajian-kajian ilmu tertentu (Cooper, 2010). Hasilnya akan digambarkan secara sistematis dengan menyajikan data yang diberikan penjelasan secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Penelitian ini menggunakan Nvivo 12 Pro untuk menganalisis bagaimana strategi pembangunan yang tepat bagi Negara-Negara yang berada di bagian timur dunia serta implikasinya terhadap SDGs pembangunan ekonomi di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki 17 tujuan dengan target 169 yang tercapai pada tahun 2030. SDGs merupakan program dunia yang telah disahkan oleh PBB dan disepakati oleh 193 negara pada tahun 2015, salah satunya adalah Indonesia. Presiden Jokowi bahkan sangat gencar melakukan sosialisasi ke semua lembaga pemerintah agar target SDGs bisa dicapai dalam waktu yang cukup singkat. Presiden bahkan meminta menteri Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, untuk bekerja keras memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar program ini berjalan dengan optimal.

Salah satu tujuan SDGs adalah pembangunan ekonomi dalam berbagai sector dengan tujuan meningkatkan prekonomian masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi adalah agenda SDGs nomor 8 yang disusun dengan tujuan meningkatkan mata pencaharian semua orang di berbagai wilayah dan dapat membuka lapangan kerja dengan skala yang lebih besar.

Program ini juga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan upah dan memperpendek jarak kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin (Sariguna et al., 2020).

Dalam konteks ekonomi, peningkatan produksi dan konsumsi adalah tolak ukur yang dipakai untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi masyarakat di sebuah Negara. Jika produksi dan konsumsi memiliki peningkatan, maka ekonomi bisa dikatakan bertumbuh (Pamungkas et al., 2018). Sehingga program yang dicetuskan oleh Negara dalam mengatasi problematika ekonomi akan selalu mengukur bagaimana daya produksi dan konsumsi di masyarakat.

Indonesia sebagai negara berkembang dan sekaligus sebagai Negara global memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan ekonomi. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui penguatan produksi di UMKM-UMKM agar kesenjangan sosial bisa diatasi dan dihentikan secara efektif. Oleh karena itulah, Indonesia di tengah pemerintahan Jokowi-JK dan Jokowi-Ma'ruf sangat focus untuk melakukan pembenahan aturan agar tercipta lingkungan yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Hal ini juga didasarkan pada angka kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia, per tahun 2020, angka kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan dari 24,8 persen menjadi 26,4 persen karena dampak COVID-19 (lihat gambar 01). Pertumbuhan ekonomi adalah sector yang paling banyak mendapatkan perhatian oleh pemerintah saat ini. Dengan pembangunan insrastuktur yang dilakukan secara besar-besaran di semua daerah, pemerintah dengan cara ini yakin akan membuat pertumbuhan ekonomi meningkat karena produksi dan suplai tidak terhambat. Distribusi bahan pokok dan bahan lainnya juga bisa dilakukan dengan cepat karena akses transportasi yang memadai karena efisiensi yang diberikan. Hal ini juga meningkatkan pendapatan belanja Negara karena pajak dan investasi semakin banyak.



Gambar 01. Data Kemiskinan di Indonesia karena dampak COVID-19 (Sumber: katadata.com, diakses pada tanggal 23 Mei 2021)

Dalam berbagai perspektif ekonomi, banyak cara yang bisa dilakukan oleh sebuah Negara untuk mendapatkan anggaran yang digunakan untuk melakukan pembangunan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan cara investasi (Aulianida et al., 2019). Investasi adalah menempatkan dana pada satu atau lebih pada sebuah asset yang dikelola

untuk tujuan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang ([Owen & Walter, 2017](#)).

Investasi juga bisa diartikan sebagai bentuk pengeluaran sejumlah uang oleh seseorang untuk mendapatkan sejumlah alat produksi yang ditujukan untuk melakukan produksi dan dijual kepada orang lain agar mendapatkan pendapatan. Sebuah Negara biasanya melakukan investasi kepada Negara lain dengan tujuan mendapatkan pendapatan dari Negara yang diberi investasi. Investasi sebuah Negara biasanya berbentuk infrastruktur dan industry.

Dalam pembangunan ekonomi, banyak perspektif yang bisa digunakan agar prekonomian tetap berputar. Namun, dalam konteks pembangunan ekonomi sebuah Negara, ada hal-hal yang harus dibatasi agar lingkungan ekonomi bisa tetap terkendali dan berjalan sesuai dengan arusnya. Menurut *Washington Consensus*, ranah pemerintah dalam pembangunan ekonomi berfokus pada tiga sector, yaitu sector infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Pembatasan ini dilakukan agar kekhawatiran akan terjadinya *government failure* seperti korupsi, kolusi dan nepotisme tidak terjadi karena akan berpotensi mengancam stabilitas anggaran belanja Negara ([Rasmini & Hermanto, 2008](#)).

Di Indonesia, pasca runtuhnya orde baru, praktik-praktik KKN masih menjadi kebiasaan birokrasi sehingga memperlambat laju pertumbuhan. Banyak pembangunan yang telah direncanakan dengan biaya yang sudah disahkan oleh pemerintah tapi tidak terealisasi sesuai dengan harapan karena sebagian besar biayanya dikorupsi. Proyek hambalang, E-KTP, Proyek Bandara Kuala Namu, Proyek Banjir Kanal Timur, Proyek Normalisasi Sungai Bekasi, Tol Nusa Dua dan masih banyak lagi.

Terhambatnya laju ekonomi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh factor-faktor internal, namun ada juga factor-faktor eksternal yang terlibat karena kebijakan organisasi internasional seperti IMF, UNICEF, WHO dan permintaan Negara asing dalam urusan ekspor yang menurun. Hingga kuartal ke-2, laju prekonomian di Indonesia turun hingga empat persen saja. Disamping itu, ada ancaman nilai tukar dollar terhadap rupiah yang mekuat, hingga april 2020, nilai tukar dollar mencapai angka 16.000 rupiah per dollar Amerika dan memberikan ancaman resesi bagi Indonesia.

Maka dari itu, pembangunan ekonomi harus dikawal oleh kebijakan politik yang mengacu pada bagaimana Negara mampu beradaptasi dengan kondisi ekonomi-politik global. Namun persoalan yang seringkali diperdebatkan oleh banyak ahli adalah bagaimana strategi pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan berdampak positif bagi warganya. Sehingga seringkali kebijakan ekonomi yang diambil terkesan membawa kepentingan asing yang disinyalir sangat berbahaya bagi keberlangsungan ekonomi di Indonesia.

Apalagi di zaman globalisasi, meskipun setiap Negara memiliki konsep ekonominya sendiri, tapi pada praktik ekonomi selalu mengambil langkah-langkah yang liberal. Sehingga dalam beberapa situasi, Negara tidak memiliki otoritas dalam membentuk pangsa pasarnya sendiri. Pandangan ekonomi liberal sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam Smith dan Jean Baptiste Say bahwa pasarlah yang menentukan kebutuhannya sendiri sehingga Negara dan pemerintah tidak perlu ikut campur dalam menentukan pasar ([Rasmini & Hermanto, 2008](#)).

Hal inilah yang menjadi tantangan Indonesia sebagai sebuah Negara dalam membangun ekonomi dan merumuskan kebijakan. Dengan adanya dominasi global dalam

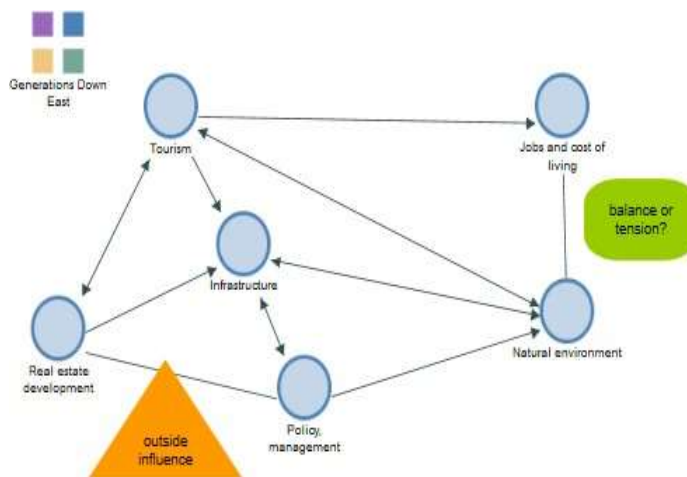
aspek ekonomi dalam politik, pemerintah sebagai eksekutor kebijakan tidak bisa bergerak bebas dalam menentukan apa yang harus diproduksi oleh bangsa ini sehingga meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya. Dengan kebijakan ini, program SDGs untuk pertumbuhan ekonomi bisa tercapai targetnya pada tahun 2030 (Panuluh & Fitri, 2016).

Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi

Salah satu strategi yang dibutuhkan untuk menyukseskan program SDGs pertumbuhan ekonomi adalah dengan membuat kebijakan yang kuat dan terintegrasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat melalui media atau platform digital. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, maka sangat mungkin pemerintah membuat satu platform khusus yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya sehingga kesenjangan ekonomi yang sangat jauh antara si kaya dan si miskin bisa diatasi.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, ada potensi yang bisa dijalankan oleh pemerintah agar mendorong kekuatan ekonominya. Memanfaatkan *platform* ekonomi berbasis digital dengan meniru konsep digital marketing yang dibawa oleh banyak pelaku ekonomi di dunia seperti Jack Ma (alibaba) dan Jeff Bezos (amazon) bisa menjadi potensi yang dikembangkan untuk membangun pangsa pasar internasional. Artinya, masyarakat Indonesia tidak hanya bergantung pada pangsa pasar nasional, namun juga bisa menyentuh pasar internasional sehingga tercipta kekuatan ekonomi yang menjangkau masyarakat di dunia.

Selama ini, system ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia masih bersifat konvensional sehingga pembiayaan tidak hanya pada produksi saja, namun juga pada distribusi produk. Dalam kasus ini, Indonesia sebagai harus memiliki *platform* bisnis berbasis digital yang pangsa pasarnya tidak hanya mengandalkan jual beli antar Negara saja, tapi menyentuh masyarakat global. Dengan demikian, Indonesia dengan *platform* bisnis digital ini dapat menciptakan pasar tidak hanya dalam skala makro (Negara), tetapi juga pasar dalam skala mikro (individu).



Gambar 02 : Analisis Sektor Ekonomi Negara Timur /NVivo

Saat ini, kita berada di tengah-tengah reorganisasi ekonomi di mana pemilik *platform* tampaknya mengembangkan kekuatan yang bahkan mungkin lebih hebat daripada pemilik

pabrik di awal revolusi industri ([Kenney et al., 2019](#)). Ide ini harusnya bisa menjadi sebuah langkah yang dijalankan oleh pemerintah agar pendapatan belanja Negara tidak hanya berasal dari satu sumber saja, namun berbagai macam sumber. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan neraca keuangan Negara yang agar tidak menambah beban utang yang begitu banyak dan pada akhirnya mempercepat pencapaian SDGs di wilayah pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja yang memadai.

Sebelum membentuk *platform* ekonomi yang kuat, produk ekonomi yang dibangun dan diperkuat harus jelas agar tercipta ekonomi yang sehat dan berjalan dengan baik ([Dingwall, 2020](#)). Merujuk pada gambar di atas, kita bisa melihat bahwa secara umum pembangun di Negara timur harus mendahulukan tiga hal, yaitu *tourism*, infrastruktur dan *policy management*. Dalam konteks ini, *tourism* (pengunjung) memiliki peran tidak hanya sebatas sebagai pengunjung, melainkan konsumen yang secara otomatis akan memasarkan produk ke masyarakat secara luas ([Goh et al., 2019](#); [Guchua, 2019](#); [Panuluh & Fitri, 2016](#); [Perzyna, 2020](#)).

Selaras dengan prinsip “*No One Left Behind*”, SDGs mendorong Agenda Pembangunan Nasional menjadi lebih partisipatif dan melibatkan multipihak yang luas baik pemerintah maupun nonpemerintah. Kebijakan-kebijakan pembangunan disusun bersama-sama dengan multipihak, sehingga rasa kepemilikan atas rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) menjadi tumbuh lebih kuat dan diharapkan pelaksanaannya tidak akan meninggalkan siapapun. Oleh karena itulah, pemerintah harus mampu membuka keran ekonomi dengan melibatkan banyak pihak, khususnya masyarakat demi mencapai tujuan ekonomi yang sehat dan lapangan pekerjaan yang luas.

Sehingga dibutuhkan strategi yang efektif untuk menarik minat pengunjung sehingga jumlahnya bertambah dalam jangka waktu yang singkat. Disinilah kekuatan Negara akan sangat dibutuhkan bukan untuk membangun jaringan politik, namun jaringan kerja sama ekonomi yang menjangkau dunia internasional dengan memanfaatkan peluang bisnis yang ada dari hubungan baik yang telah terbangun sejak dulu. Dengan demikian, potensi perkenomian bisa diprediksi menjadi lebih kuat dan berdampak positif bagi masyarakat.

Selain pengunjung, infrastruktur sangat berpengaruh pada kekuatan ekonomi karena bicara tentang suplay produk apakah bisa terus berjalan dengan efisien atau tidak. Rata-rata Negara maju dalam bidang ekonomi memiliki infrastruktur yang kuat agar penyaluran bahan produksi tidak mengalami hambatan ([Ishatono & Raharjo, 2016](#)). Di Indonesia, pembangunan infrastruktur sangat gencar dilakukan di pemerintahan Jokowi dengan tujuan untuk menguatkan ekonomi nasional. Kesadaran bahwa globalisasi mendorong sebuah kemajuan untuk suatu Negara memang nyata adanya, dan dalam kondisi ini, Negara tidak bisa menolak perkembangan yang maju dan cepat, satu-satunya langkah adalah dengan beradaptasi.

Platform bisnis digital adalah salah satu infrastruktur yang harus diperkuat oleh Negara agar kemandirian ekonomi bisa diwujudkan. Dengan hadirnya *platform* bisnis yang dijalankan langsung oleh pemerintah bisa memberikan dampak yang positif bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Artinya, *platform* bisnis berbasis digital tidak hanya dimainkan oleh individu saja, tapi juga Negara. Agar dapat direalisasikan dengan baik, ide ini harus ditopang dengan kebijakan atau aturan yang mengatur bagaimana bisnis ini berjalan. Agar tidak

dikooptasi oleh individu, maka *platform* bisnis ini hanya bisa dimiliki oleh Negara saja. Dengan demikian, perdagangan internasional atau ekspor tidak lagi mengadakan cara-cara yang konvensional, namun juga memanfaatkan kemajuan teknologi.

Budaya ekonomi yang seperti inilah yang harusnya dibangun oleh pemerintah agar program pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu tujuan dari SDGs bisa dicapai dengan optimal pada tahun 2030. Kemajuan teknologi yang sangat pesat jangan hanya menjadi realitas yang diamini saja, tanpa memanfaatkan potensi ekonomi yang ada didalamnya. Apalagi dengan situasi ekonomi politik yang didominasi oleh kebijakan ekonomi internasional yang sangat membatasi jalannya prekonomian sebuah Negara, termasuk Indonesia. Untuk mengatasi hal itu, Negara harus mampu membangun kekuatan ekonomi yang ramah dengan masyarakat dunia, terlebih *brand* Indonesia saat ini sangat banyak digemari oleh masyarakat dunia.

Dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat sebagai supliyer perlu diperkuat dan didorong agar dapat memenuhi permintaan pasar dalam skala internasional. Di Negara-negara maju, praktik ekonomi semacam ini belum dijalankan sehingga pendapatan Negara mayoritas berasal dari pajak dan ekspor yang dikelola secara konvensional. Sehingga keberlangsungan prekonomian sangat terikat dari hasil pajak, utang Negara dan ekspor saja. Jika perilaku ekonomi semacam ini tidak tersu diperbaharui, maka kedepan tantangan ekonomi nasional akan jauh lebih berat, dan intervensi internasional akan semakin menguat dan pada akhirnya ketergantungan Indonesia pada kebijakan internasional akan semakin menguat ([Suprijanto, 2011](#)).

Apalagi situasi pandemi yang belum usai, maka Negara harus membangun imperium ekonominya dengan cara-cara yang kreatif pertumbuhan ekonominya tetap meningkat ([Perzyna, 2020](#)). Meskipun belum ada referensi yang jelas, namun ide ini bisa menjadi langkah yang bisa ditempuh agar pendapatan Negara diluar pajak juga ada, dan bahkan anggaran belanja bisa mengalami peningkatan yang signifikan. Meminjam istilah Adam Smith, prekonomian biarlah dijalankan oleh *invisible hand*, Negara sebagai pelaku ekonomi dan pembuat kebijakan tetap memposisikan diri sebagaimana mestinya.

Meskipun saat ini Indonesia masih menjadi Negara yang menggantungkan ekonominya pada perdagangan, finansial internasional dan produksi yang sekaligus menjadi penyebab sulitnya Indonesia untuk keluar dari tekanan internasional, namun gerakan kedaulatan ekonomi tentu tetap harus dibangun agar bisa keluar dari belenggu ekonomi yang diintervensi oleh IMF, NTc, dan Bank Dunia. Dengan imperium bisnis yang mengandalkan kemajuan teknologi dengan dukungan hukum kepemilikan ada ditangan Negara (policy), tentu cepat atau lambat kedaulatan ekonomi politik bisa diwujudkan.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana SDGs yang disahkan oleh PBB pada tahun 2015 berdampak pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, khususnya di wilayah ekonomi. Sukses program dunia bernama SDGs dalam bidang pertumbuhan ekonomi memang sangat berat dan memiliki banyak tantangan, khususnya di Indonesia. Tidak hanya pada sector masyarakat yang masih kurang kesadarannya untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi secara mandiri, melainkan dipengaruhi juga oleh kebijakan yang

tumpang tindih. Belum lagi karena pengaruh kebijakan ekonomi politik yang sampai hari ini mengundang perdebatan karena seringkali berubah sesuai dengan kondisi ekonomi global membuat Negara tidak memiliki otoritas yang kuat dalam menentukan laju pertumbuhan ekonominya sendiri (Hardin, 2017).

Dampaknya adalah, prekonomian Negara hanya bersumber dari pajak dan hasil ekspor saja, belum dapat berkembang karena kebijakan global yang sangat mengikat. Di tengah kondisi ekonomi yang sangat tidak menentu karena dampak pandemi, laju pertumbuhan ekonomi di hampir semua Negara mengalami degradasi yang cukup signifikan. Ibarat sebuah *puzzle*, ekonomi dunia saat ini harus disusun satu per satu agar tercipta budaya ekonomi yang stabil dan sesuai dengan apa yang diharapkan (Islam & Muyeed, 2020). Apalagi ekonomi adalah sarana untuk memenuhi hajat hidup semua orang. Maka dibutuhkan sebuah budaya ekonomi yang berpijak pada kebijakan politik yang menyentuh semua kepentingan masyarakat di dunia (Owen & Walter, 2017).

Oleh karena itu, Indonesia kedepan harus membangun ekosistem ekonomi yang terjalin tidak hanya dalam batas-batas antar Negara saja, melainkan relasi ekonomi yang menyentuh personal masyarakat di setiap Negara di dunia. Hal ini akan membantu program SDGs karena ekosistem ekonomi yang terintegrasi dengan kepentingan nasional, internasional dan personal harus diimplementasikan sebagai upaya pembangunan ekonomi nasional. Salah satu langkahnya adalah dengan membangun *platform* bisnis digital yang tidak terbatas pada relasi bilateral saja, namun relasi personal masyarakat juga perlu dibangun untuk membangun pasar yang lebih luas.

Pasar digital yang dirancang untuk tujuan perdagangan internasional yang melibatkan Negara dan masyarakatnya secara langsung memungkinkan Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang besar jika dikelola dengan control Negara. Apalagi saat ini kita berada di tengah-tengah pasar bebas, di mana praktik ekonominya berjalan dengan prinsip-prinsip liberal. Khusus untuk wilayah Asia, MEA yang diresmikan pada tahun 2015 harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Negara agar tidak tertinggal dari Negara-negara lain.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa MEA tidak bisa dilepaskan dari pandangan positif dan negative. Namun adanya ketimpangan pendapatan yang dialami oleh Negara-negara ASEAN bisa menjadi solusi untuk membangkitkan kekuatan ekonomi agar lebih stabil. MEA bisa saja menjadi potensi untuk pembangunan domestic dan pengembangan internasional (Rofiq, 2014). Untuk itulah, Indonesia dengan potensi kekayaan alam yang besar harus mampu memanfaatkan ruang ini sebagai ajang pembangunan ekonomi untuk kemajuan Indonesia di masa mendatang.

Upaya ini tentu masih langkah awal, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah kedaulatan ekonomi tanpa campur tangan dunia internasional. Kondisi prekonomian Indonesia saat ini memang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh IMF dan Bank Dunia karena keterikatan utang sehingga secara politik Indonesia sangat rentan mendapatkan gangguan dalam ekspansi ekonomi. Tentu hal ini bukanlah perkara mudah, namun setiap langkah harus dijalankan agar kedepan kita menjadi Negara yang berdaulat dan bebas menentukan nasib sendiri.

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah melakukan penelitian yang lebih spesifik pada pembangunan ekonomi berbasis rumah tangga agar SDGs tidak hanya berdampak secara makro, namun juga menyentuh wilayah-wilayah mikro. Masih sangat banyak poin yang bisa

dijadikan topic penelitian di dalam SDGs, apalagi berkenaan dengan proses realisasi program SDGs yang harus banyak dikaji agar ditemukan formulasi yang tepat sehingga tepat sasaran dan membantu pembangunan Indonesia kedepan.

BIBLIOGRAFI

- AbduRofiq, A. (2014). Menakar Pengaruh Masyarakat Ekonomi Asean 2015 Terhadap Pembangunan Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1543>
- Aulianida, D., Liestyasari, S. I., & Ch, S. R. (2019). Sistem Ekonomi Indonesia Investasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Dingwall, J. (2020). [Commercial Mining Activities in the Deep Seabed beyond National Jurisdiction: the International Legal Framework](https://doi.org/10.1163/9789004391567_009). *The Law of the Seabed*, 1(1), 139–162. https://doi.org/10.1163/9789004391567_009
- Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan Respon Kebijakan yang Ditempuh The Impact of the COVID-19 Pandemic on Macroeconomic Developments in Indonesia and The Policy Response taken. *Inovasi*, 16(2), 206–213. DOI: <https://dx.doi.org/10.29264/jinv.v16i2.8255>
- Goh, X., Tong, W., & Tang, T. (2019). [Financial Openness and Trade Openness Nexus : Empirical Evidence from Global Data](https://doi.org/10.1163/9789004391567_009). *Capital Marketing Review*, 27(1), 1–18.
- Guchua, A. (2019). [Asymmetrical Threats and the Impact of Hybrid War on Global Security and Role of Nato in Ensuring Peace](https://doi.org/10.33674/2201811). *Ante Portas - Studia Nad Bezpieczeństwem*, 2(2), 213–224. <https://doi.org/10.33674/2201811>
- Hafizah, Y. (2005). [Yulia Hafizah](https://doi.org/10.33674/2201811). *Millah*, 4(2), 31–46.
- Hardin, C. (2017). The politics of finance: cultural economy, cultural studies and the road ahead. *Journal of Cultural Economy*, 10(4), 325–338. <https://doi.org/10.1080/17530350.2017.1297249>
- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan. *Share : Social Work Journal*, 6(2), 159. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13198>
- Islam, M. R., & Muyeed, A. (2020). [Impacts of COVID-19 Pandemic on Global Economy: a Meta-Analysis Approach](https://doi.org/10.30780/ijtrs.v05.i05.002). *International Journal of Technical Research & Science*, 05(05), 8–19. <https://doi.org/10.30780/ijtrs.v05.i05.002>
- Kenney, M., Bearson, D., & Zysman, J. (2019). [The Platform Economy Matures: Pervasive Power, Private Regulation, and Dependent Entrepreneurs](https://doi.org/10.2139/ssrn.3497974). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3497974>
- Owen, E., & Walter, S. (2017). Open economy politics and Brexit: insights, puzzles, and ways forward. *Review of International Political Economy*, 24(2), 179–202. <https://doi.org/10.1080/09692290.2017.1307245>
- Pamungkas, A. H., Sunarti, V., & Wahyudi, W. A. (2018). Peran PKBM dalam Peningkatan

- Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sesuai Target SDGs. *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(3), 301. DOI : <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i3.101240>
- Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). [Perkembangan pelaksanaan sustainable development goals \(SDGs\) di Indonesia](#). *Briefing Paper 02, infid(Sustainable Development Goals (SDGs))*, 1–25. http://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/upload-book/Briefing_paper_No_1_SDGS_-2016-Meila_Sekar.pdf
- Perzyna, M. (2020). [The Substance of Solidarity: What the Response to the COVID-19 Pandemic Says About the Global Refugee Regime](#) *The Substance of Solidarity: What the Response to the COVID-19 Pandemic Says About the Global Refugee Regime*.
- Prasmuko, A., & Anugrah, D. F. (2010). Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perekonomian Daerah. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 12(3), 377–411. <https://doi.org/10.21098/bemp.v12i3.242>
- Rasmini, M., & Hermanto, B. (2008). *Konsep Sistem Ekonomi Indonesia*. 1–54.
- Sariguna, P., Kennedy, J., & Ekonomi, F. (2020). [Modul ekonomi pembangunan](#).
- Sihombing, L. (2013). *Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs)*. 4(Mei), 129–156.
- Suprijanto, A. (2011). Dampak globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Imiah CIVIS*, 1(2), 100–119. file:///C:/Users/user/Downloads/592-929-1-SM.pdf DOI: <https://doi.org/10.26877/civis.v1i2/Juli.592>